



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile (0414) 21070

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/10/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 Nomor 140);
 14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. membantu PPK dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100.3.6/10/II/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangan ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 05 Februari 2026

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten di Benteng.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 100.3.6/10/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH T. A 2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ALVIAN SENLY, S.E. NIP. 19940909 201903 1 007	Plt. Kasubag. Program	PPTK
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ALVIAN SENLY, S.E. NIP. 19940909 201903 1 007	Plt. Kasubag. Program	PPTK
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
4.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	PPTK
2.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	PPTK
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
1.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
4.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
5.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)				
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	PPTK
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	PPTK
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya				
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	PPTK
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	PPTK
IV. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				
1.	Fasilitasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
2.	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
2. Invensi dan Inovasi				
1.	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

